



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat *urgensi* daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategis, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- Korelasinya terhadap berbagai isu-isu strategis daerah.



4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 - 2016 Tahun ke 5. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, adalah:

**“MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL, MANDIRI, UNGGUL, DEMOKRATIS DAN AGAMIS
(SAMUDRA)”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut:

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan SDM yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas);
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan SDM profesional;
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas);
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat;
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional;
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

Kesembilan fokus tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten menuju terwujudnya Visi Misi Pembangunan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan publik, yang menjadi fokus peningkatannya adalah pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan merupakan kunci peningkatan sumber daya manusia dan bersifat jangka panjang dan sebagai modal pembangunan yang utama. Kualitas pendidikan yang baik juga dapat memberi peluang untuk berkompetisi dalam penyediaan tenaga kerja. Disamping itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas utama dalam membentuk manusia yang handal dalam menjalankan roda pembangunan. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, keterlibatan dari unsur swasta dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pencapaian tersebut. Peningkatan kualitas layanan publik difokuskan diantaranya pada pelayanan identitas kependudukan dan perizinan.



Pertumbuhan Ekonomi yang diarahkan pada tahun ke-5 pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Potensi akan sumber daya tersebut memang sangat mungkin dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan topografi dan luasan lahan yang tersedia menjadikan sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan dalam merintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan tersebut.

Kebijakan khusus yang ditempuh juga untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah strategis dan cepat tumbuh perlu mempertimbangkan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pada tahun ke-5 pembangunan jangka menengah tetap melanjutkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam lestari, yang diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2011-2016) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil	1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi
			2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran lisrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.
			3. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)
			4. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat
			5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi. 7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas)	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi	1. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik) 2. Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sdm propesional.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit 3. Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan 4. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur. 5. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan 6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji). 7. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN
4	Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya	Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. 2. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
			3. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah
			4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.
			5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
			6. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi
			7. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
			8. pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal
			9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing	1. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
			2. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap
			3. Ketersediaan peralatan, obat-



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.</p> <p>4. Pelayanan dan Perlingungan kesehatan keluarga, ibu dan anak</p>
6	Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat	Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan	<p>1. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.</p> <p>2. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.</p>
7	Meningkatkan penataan zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.	Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya	<p>1. Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.</p> <p>2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.</p> <p>3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.</p>
8	Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Terciptanya keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat	<p>1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.</p> <p>2. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah</p> <p>3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku</p> <p>4. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial</p> <p>5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.</p>



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			6. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
9.	Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan dan pembinaan atlet untuk berprestasi	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan	1. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan. 2. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan 3. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah. 4. Pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana tabel di atas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Provinsi;
2. Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa;
3. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu);
4. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat;
5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik;
6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi;
7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu;
8. Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik);
9. Tenaga Kerja yang terampil dan siap kerja;
10. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
11. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit;
12. Penataan wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;



13. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas dari KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur;
14. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan;
15. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji);
16. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas dari KKN;
17. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi;
18. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan;
19. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah;
20. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat;
21. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran;
22. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi;
23. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga;
24. pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal;
25. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
26. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau;
27. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap;
28. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya;
29. Pelayanan dan Perlingungan kesehatan keluarga, ibu dan anak;
30. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan;
31. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi;
32. Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan;
33. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup;
34. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup;
35. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam;
36. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah;
37. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku;



38. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial;
39. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis;
40. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
41. Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan;
42. Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan;
43. Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah;
44. Pengembangan dan pendidikan pemuda/pemudi Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2016
I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas) 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional. 4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas). 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat. 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. 8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Infrastruktur 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Ekonomi Kerakyatan 6. Penanggulangan Kemiskinan 7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup 8. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga



1. Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja SKPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;
- 3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *System Merriedd* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
- 4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas di daerah *remote area*.

2. Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur–Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
- 2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
- 3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
- 4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
- 5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
- 6) Perluasan jaringan listrik interkoneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
- 7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

3. Pendidikan

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;
- 3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
- 4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK/ sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
- 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
- 7) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
- 8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
- 9) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- 10) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak;
- 11) Perlakuan khusus untuk sekolah di *remote area* (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
- 12) Pemantapan tatakelola BOS sehingga efisien dan efektif;



- 13) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;
- 14) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 15) Meningkatkan APM SD/ sederajat menjadi sebesar 95,89 %;
- 16) Meningkatkan APM SMP/ sederajat menjadi sebesar 80,10 %;
- 17) Meningkatkan APM SMA/ sederajat menjadi sebesar 64,20 %;
- 18) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
- 19) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

4. Kesehatan

- 1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 85 persen;
 - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;
 - c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
 - e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
 - f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
 - g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70 persen;
 - h. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70persen;
 - i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 persen;
- 3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
- 4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
 - a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
 - b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
- 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;
- 6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;

5. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan



- 1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
- 2) Pengutan modal, saprodi dan komposter;
- 3) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
- 4) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
- 5) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
- 6) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
- 7) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;
- 8) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
- 9) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
- 10) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan instruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;
- 11) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
- 12) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
- 13) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;
- 14) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;
- 15) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;
- 16) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
- 17) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
- 18) Pengembangan usaha agroindustri;
- 19) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
- 20) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 92,75 %;
- 21) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar 6,57.
- 22) Mengembangkan kawasan destinasi, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

6. Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
- 2) Menggerakkan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah



Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.

- 3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunankematian.
- 4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
- 5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan
- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup

- 1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
- 2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan pelibatan masyarakat secara aktif.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
- 4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

8. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga

- 1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di pendidikan dan Perda-Perda lain;
- 2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
- 3) Pembinaan dan penggalan seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
- 4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
- 5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
- 6) Mengenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site (www.tanjabtinkab.go.id);
- 7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olah prestasi;
- 8) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan "Sister City";
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;
- 10) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

4.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Kebijakan dan arah keuangan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi lebih dari itu kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dasar dari otonomi daerah



yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Harapan tersebut harus dilaksanakan dengan penciptaan kondisi dimana seluruh bentuk pengeluaran harus didasarkan kepada prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi, dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terkait dengan pencapaian Visi dan Misi. Dengan demikian, maka setiap pengeluaran harus mencapai sasaran pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kewenangan daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergambar pada tabel 4.3 berikut :



Tabel 4.3
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, PROVINSI JAMBI, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RPJMN 2015 – 2019	RPJPD PROVINSI JAMBI 2005– 2025 (Periode Ke-3 RPJMD 2016-2021)	RKPD 2016 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2016
<p>I. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun wibawa politik Luar Negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. 2. Memperkuat sistem pertahanan negara 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik <p>II. BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional 4. Untuk penguasaan Sumber Daya Alam melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR dan atau saham untuk masyarakat lokal sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan 5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada sumber daya manusia yang berkualitas 2. Pelayanan dasar yang merata dan berkualitas 3. kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien 4. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas 5. Perkembangan penerapan IPTEK 6. Daya saing perekonomian Provinsi Jambi semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan pertanian/perkebunan (agroindustri dan agrobisnis) serta perikanan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kegiatan yang direncanakan harus berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2. Tetap fokus kepada usulan prioritas kecamatan, terutama infrastruktur lintas desa – lintas kecamatan; 3. Implementasi pelaksanaan terhadap beberapa perda strategis, seperti LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Perda Jalan, Perda Pendidikan Berkualitas, Perda Bangunan dan Gedung; 4. Selektif dalam memberikan rekomendasi perizinan kepada investor terkait alih fungsi lahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 5. Pemberian TKD berdasarkan kesulitan tempat bertugas (sangat sangat terpencil, sangat terpencil, terpencil dan biasa) dengan maksud agar aparat di tempat tugas tersebut dapat lebih meningkatkan kinerja, serta lebih fokus dalam menjalankan tupoksi nya; 6. Penuntasan beberapa program kegiatan yang terkait dengan visi misi “SAMUDRA” seperti pengurangan angka kemiskinan, bantuan pompong, benih pertanian, peternakan, perikanan, bedah rumah samudra, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016. 7. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 dan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021.



<ul style="list-style-type: none"> 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. Membangun karakter dan potensi wisata 15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16. Pengembangan industri manufaktur <p>III. BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga 		<ul style="list-style-type: none"> 8. Peningkatan Pemberdayaan dan Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. 9. Penyelesaian serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 10. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan Daerah. 11. Pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana BOS. 12. Pengalokasian anggaran kesehatan secara bertahap menuju 10% dari total belanja APBD di luar gaji. 13. Dengan terus meningkatnya Dana Desa setiap tahunnya diharapkan dapat mempercepat proses pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan. 14. Penataan Pemilihan Kepala Desa secara serentak. 15. Pengembangan pendidikan beragama sampai tingkat terbawah seperti Madrasah Diniyah, Insentif pegawai SARA, Qori dan Qori'ah.
---	--	--